

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari perguruan tinggi yang menjadi subjek penelitian ini, diketahui bahwa kondisi kebijakan dan implementasi pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas dapat terlihat pada komitmen yang dimiliki perguruan tinggi. Pertama, telah terdapat perguruan tinggi yang sudah memiliki komitmen yang sudah diturunkan dalam kebijakan dalam penerimaan mahasiswa disabilitas. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan beberapa formasi dalam skema penerimaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Skema ini diantaranya jalur penerimaan pendaftaran umum, jalur afirmasi khusus bagi Penyandang Disabilitas, jalur campuran di mana Penyandang Disabilitas dapat memilih hendak melalui jalur pendaftaran umum atau afirmasi, jalur skema parsial, dan jalur khusus.

Penerimaan jalur umum dilakukan perguruan tinggi di mana perguruan tinggi tidak melakukan pemisahan antara mahasiswa disabilitas dan non disabilitas. Pada perguruan tertentu yang melakukan jalur ini menuliskan pilihan apakah calon mahasiswa merupakan seorang Penyandang Disabilitas atau tidak. Skema jalur afirmasi khusus bagi Penyandang Disabilitas adalah jalur di mana perguruan tinggi membuka pendaftaran khusus bagi Penyandang Disabilitas. Sementara skema jalur campuran adalah skema di mana perguruan tinggi memberikan pilihan bagi mahasiswa disabilitas untuk memilih hendak mengikuti jalur umum atau jalur afirmasi. Skema parsial yang peneliti maksud pada penelitian ini adalah di mana perguruan tinggi menerima perguruan tinggi baik melalui jalur umum atau afirmasi namun hanya menyediakan program studi tertentu untuk bisa dipilih oleh Penyandang Disabilitas. Alasan lain perguruan tinggi menerima mahasiswa disabilitas dilatarbelakangi prinsip pendidikan dari universitas dan ketidaksengajaan karena mahasiswa disabilitas tidak mengakui dirinya sebagai Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data dari mahasiswa disabilitas alasan pemilihan perguruan tinggi didasari atas ketersediaan jurusan PLB atau PKh, jurusan yang sesuai dengan bakat mahasiswa, kondisi apakah perguruan tinggi tersebut ramah disabilitas, lokasi kampus dekat dengan tempat tinggal, dan kondisi perekonomian keluarga. Sementara untuk pemilihan perguruan tinggi swasta dilatarbelakangi dengan alternatif bila tidak diterima di perguruan tinggi negeri.

Kebijakan perguruan tinggi juga terlihat dalam upaya perguruan tinggi yang memberikan program pelatihan bahasa isyarat untuk dosen dan mahasiswa dan menjadikan bahasa isyarat sebagai mata kuliah dilatarbelakangi oleh kondisi setelah penerimaan dilakukan, adanya perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah pendidikan inklusi sebagai mata kuliah wajib di program keguruan sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa, saat perguruan tinggi terbuka terhadap disabilitas, perguruan tinggi juga mengalami peningkatan dalam pemberian pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi empiris dan menjadi upaya untuk menjawab kebutuhan.

Selain itu, penerimaan mahasiswa disabilitas juga berdampak pada penyediaan beasiswa bagi mahasiswa disabilitas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa perguruan tinggi menerapkan pendekatan berbagi sumber daya (*sharing resources*), memberikan beasiswa penuh, beasiswa dari universitas langsung, atau beasiswa ADIK dan bantuan KIP-Kuliah yang diberikan oleh Kementerian terkait. Penerimaan mahasiswa disabilitas juga berdampak pada pelaksanaan komitmen dan kebijakan dalam program seperti membantu dalam tes TOEFL, program pendampingan rutin kepada mahasiswa, program penguatan kapasitas sivitas Akademika, masa keakraban dan MOKKA, dan perayaan kegiatan hari disabilitas internasional meski masih dominan hanya dilakukan oleh HIMA atau prodi tertentu.

Namun, penerimaan mahasiswa disabilitas masih tetap menyisakan permasalahan klasik di mana kampus belum menyediakan aksesibilitas yang tepat. Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa kondisi mahasiswa untuk bisa meraih kesuksesan dalam belajar tidak selalu merujuk kepada tantangan akademis. Namun tantangan non akademis seperti letak ruangan yang sudah diakses oleh mahasiswa

dengan ragam disabilitas tertentu membuat mahasiswa tersebut terhalang dalam partisipasinya atau kehadirannya dalam proses akademik. Ditemukan juga kebijakan yang dilakukan terkait aksesibilitas tidak menjawab persoalan yang dialami mahasiswa disabilitas dan kurangnya pemahaman akan disabilitas sehingga disabilitas cenderung direlasikan hanya dengan pengguna kursi roda.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa aksesibilitas tetap menjadi masalah utama di perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa disabilitas. Keberagaman disabilitas menyebabkan perbedaan kebutuhan akomodasi yang layak. Dukungan akademik bagi mahasiswa disabilitas ditemukan di beberapa perguruan tinggi yang telah menyediakan kajian tentang disabilitas dan mata kuliah inklusi, meskipun tanpa keberadaan Unit Layanan Disabilitas dan kebijakan yang mengatur. Dukungan ini sering kali diberikan oleh dosen tertentu, seperti penambahan waktu ujian dan penyesuaian tugas, meskipun beberapa dosen masih menyamakan dukungan ini dengan mahasiswa non-disabilitas. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara dosen dalam memberikan dukungan akademik.

Namun meski keberadaan ULD dipandang sangat urgen dan penting, ditemukan perguruan tinggi yang sudah memiliki ULD, keberadaan dan fungsinya masih belum jelas dipahami oleh mahasiswa disabilitas. Terdapatnya perguruan tinggi yang belum mengetahui amanat pembentukan ULD, ketidaktahuan proses membentuk ULD, dan keberadaan tugas dan fungsi ULD di perguruan tinggi yang sudah memiliki tidak diketahui mahasiswa disabilitas menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini menemukan faktor-faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif berdasarkan hasil penelitian adalah adanya komitmen dalam kebijakan, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa disabilitas, adanya komitmen penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, adanya kesadaran akan hak asasi dan keberagaman, ada dukungan akomodasi yang layak

pada saat ujian, keberadaan sosok yang berpengaruh, seperti memiliki dosen yang terbuka dan memahami keberagaman mahasiswa sangat membantu mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan. Kondisi kebijakan dan faktor-faktor pendukung yang ditemukan dengan sendirinya membantu membentuk dan membangun budaya yang inklusif. Hal ini didorong karena penerimaan dan kesadaran untuk memberikan layanan.

Meskipun ada kemajuan, akar permasalahan utama adalah stigma dan eksklusi sosial yang bersumber dari kesalahpahaman dan keterbatasan pengetahuan akan disabilitas dan keragamannya dan berdampak pada keseluruhan aspek kebijakan, praktik, capaian. Pada penelitian ini juga ditemukan adanya stigma yang berasal dari dalam diri mahasiswa dengan disabilitas. Pengetahuan yang kurang komprehensif mengenai Penyandang Disabilitas di mana Penyandang Disabilitas cenderung hanya dihubungkan dengan disabilitas yang terlihat atau dapat teridentifikasi langsung. Para subjek memiliki kebingungan mengenai ragam disabilitas. Kebingungan ini berdampak pada penerimaan mahasiswa disabilitas yang masih terbatas pada mahasiswa disabilitas fisik. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman yang terbatas yang dimiliki perguruan tinggi menyebabkan tidak memadainya sistem pendukung dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beragam kelompok mahasiswa Penyandang Disabilitas. Berikutnya ditemukan keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh dengan penerimaan mahasiswa. Keterbatasan sumber daya ini lebih direlasikan kepada disabilitas tertentu dalam konteks ini disabilitas tuli. Meski ada perguruan tinggi yang memutuskan menerima mahasiswa disabilitas tanpa membedakan dengan mahasiswa non disabilitas lainnya, ternyata pada akhirnya berdampak pada kesulitan dalam hal SDM, fasilitas, dan lainnya

Selanjutnya keterbatasan infrastruktur, perangkat teknologi, dan tenaga pendamping yang memadai. Penerimaan mahasiswa disabilitas menjadi aspek dilematis bagi perguruan tinggi karena penerimaan ini direlasikan dengan permasalahan aksesibilitas yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Menerima mahasiswa disabilitas, kekurangan fasilitas, ruang kuliah, SDM, sarana dan lain sebagainya sebagai permasalahan yang dihadapi. Meskipun ada beberapa

perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan program pendidikan inklusif, masih banyak yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep kampus inklusif. Meski penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, namun permasalahan dan tantangan yang terjadi mirip dengan isu di pendidikan dasar dan menengah.

Namun, penelitian ini menemukan praktik menjanjikan di mana terdapat perguruan tinggi yang menerima mahasiswa disabilitas kemudian merekrut mahasiswa tersebut menjadi dosen dan melibatkan orang tua untuk memastikan pemberian layanan terbaik bagi mahasiswa disabilitas. Pandangan bahwa Penyandang Disabilitas yang berpikir tidak bisa kuliah dipandang sebagai peluang untuk bagi salah satu perguruan tinggi di Papua untuk menghapus stigma tersebut. Terdapatnya mahasiswa non disabilitas yang melakukan penelitian terkait isu disabilitas dalam tugas akhir, adanya mahasiswa dari jurusan lain yang membuat kursi roda untuk teman disabilitas, pemberian uang kuliah gratis bagi mahasiswa disabilitas yang mengambil magister dan adanya perguruan tinggi yang membuka program studi PLB atau PKh menjadi praktik yang menjanjikan dalam pewujudan pendidikan tinggi yang inklusif.

Dalam penelitian ini ditemukan peluang yang dapat dipergunakan dalam peningkatan dan pengembangan pemenuhan hak pendidikan tinggi ini. Terdapatnya perguruan tinggi yang sudah menerima mahasiswa penyandang disabilitas dan sudah memberikan layanan pendidikan untuk membantu mahasiswa penyandang disabilitas dapat memiliki kualitas pembelajaran merupakan bukti bahwa tidak selamanya pemenuhan hak selalu dilatarbelakangi oleh mandat atau amanat kebijakan dari pemerintah. Perguruan tinggi yang memiliki tugas menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa tentu memiliki keprihatinan dan perhatian khusus terhadap kualitas lulusan dan juga akreditasi perguruan tinggi khususnya perguruan swasta yang masih berupaya mendapatkan calon mahasiswa dengan berlandaskan akreditasi. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk bisa mengkaji kebijakan yang berelasi dengan keunggulan dan kualitas pendidikan dengan tidak mengabaikan kondisi di akar rumput di mana

dilema penerimaan dan penilaian serta akreditasi ini masih terus membayangi perguruan tinggi.

Belum terdapatnya data perguruan tinggi yang terpilah yang sudah memiliki ULD dan jumlah mahasiswa disabilitas dapat dijadikan peluang bagi Kementerian Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pemetaan terpilah terkait perguruan tinggi. Saat ini di tingkat perguruan tinggi juga belum ada indikator atau indeks perguruan tinggi yang inklusif yang dapat dijadikan tolak ukur oleh perguruan tinggi dalam memberikan layanannya. Selain itu, perlunya membangun kolaborasi dan kemitraan antara perguruan tinggi dengan organisasi penyandang disabilitas akan membantu perguruan tinggi dalam proses membangun budaya yang inklusif.

Penelitian ini menawarkan strategi pendekatan dengan tiga aspek yaitu Kebijakan, Praktik, dan Capaian yang direlasikan dengan pemantauan dan kesadaran akan pentingnya evaluasi dan pelaporan yang berperan sebagai landasan untuk terus meningkatkan layanan dan laporan sebagai *novelty* penelitian. Dalam implementasi *novelty*, peneliti membuat strategi ini diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip berkala, berkelanjutan, berbasis hak, dan inklusif. Pada setiap tahapan, tidak terlepas dari upaya melakukan edukasi dan sosialisasi terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan perspektif disabilitas. Hal ini berelasi dengan temuan penelitian ini di mana akar permasalahan adalah ketidaktahuan akan disabilitas.

5.2 Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

5.2.1 Implikasi teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas dan pengkajian kebijakannya. Penelitian ini dapat dijadikan landasan sehingga kebijakan yang dibuat dan proses pengimplementasiannya.

5.2.2 Implikasi Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi perguruan tinggi usulan rancangan strategi dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan inklusi dan keberagaman di perguruan tinggi sehingga secara kuantitatif dalam dilihat peningkatan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi serta penikmatan pendidikan tinggi mereka khususnya secara akademik. Perguruan tinggi dapat mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan diterbitkan untuk menjadi data empiris yang penyelenggaraannya dapat dipantau oleh lembaga atau unit yang dibentuk dan ditunjuk oleh perguruan tinggi.

Bagi perguruan tinggi yang terlibat dalam penelitian ini, diharapkan penelitian dapat mendorong perubahan dan mempertegas komitmen yang sudah dimiliki serta mendorong peningkatan penerimaan mahasiswa disabilitas.

b. Bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi

Sementara bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi, peneliti menemukan bahwa kementerian memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan peningkatan inklusi dan keberagaman di perguruan tinggi. Kementerian perlu memastikan seluruh perguruan tinggi memahami dengan baik bahwa pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas merupakan hak seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ketidaktahuan akan amanat peraturan bagi perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi terkait peraturan terkait. Sehingga proses sosialisasi yang dikerjakan selama ini perlu dikaji ulang agar dapat mengurai ketidakpahaman akan disabilitas dan kebijakan yang melekat terkait disabilitas. Kebingungan perguruan tinggi mengenai ragam disabilitas dan apa saja indikator penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif dapat diatasi dengan penyediaan indikator oleh Kementerian. Kebimbangan dalam penerimaan mahasiswa disabilitas dan relasinya dengan penilaian dan akreditasi perguruan tinggi juga perlu dikaji sehingga tidak menjadi alasan perguruan tinggi untuk tidak memberikan layanan pendidikannya bagi penyandang disabilitas.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan yang dipaparkan pada Bab IV sebelumnya, maka penelitian ini mengerucutkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Saran untuk Perguruan Tinggi

Strategi yang ditawarkan peneliti dapat dipakai oleh perguruan tinggi untuk bisa memulai merekonstruksi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif.

2. Saran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi

Mendorong Kementerian membuat indikator penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif disabilitas dan memastikan seluruh perguruan tinggi sudah memiliki ULD dengan memastikan ketersediaan dukungan anggaran khususnya bagi perguruan tinggi di yang dekat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai indikator pendidikan tinggi yang inklusif disabilitas dengan memanfaatkan keberadaan ULD. Memastikan adanya data terpilah terkait jumlah mahasiswa disabilitas dan penyelesaian proses studinya di perguruan tinggi, serta mendorong dimasukkannya program sensitivitas disabilitas dalam tahapan persiapan pelatihan dasar bagi dosen.

3. Saran untuk Komisi Nasional Disabilitas

Meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kebijakan terkait untuk mendorong pemahaman terkait disabilitas di perguruan tinggi. Rancangan strategi ini dapat dipakai sebagai rujukan untuk melakukan kolaborasi dengan kementerian terkait dalam memastikan adanya pembuatan indikator perguruan tinggi yang inklusif disabilitas sekaligus panduan dalam pembentukan ULD Pendidikan Tinggi. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai rujukan bagi KND untuk membuat indikator pemantauan hak pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas secara internal.

4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat proposisi strategi yang bersifat metode konseptual yang belum diujikan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan uji analisa empiris atas proposisi strategi yang ditawarkan. Penelitian ini tidak secara khusus menyorot perguruan tinggi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus

inklusif dan sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas atau nama lain sejenis, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menyasar perguruan tinggi tersebut.